

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Pendapatan Parkir DKI Tahun Lalu Tak Capai Target

**JAKARTA (Poskota)** - Dinas Perhubungan DKI diminta untuk menggenjot pendapatan daerah dari retribusi perparkiran tahun 2023. Pasalnya, pendapatan dari parkir pada tahun 2022 lalu belum mencapai target yang diharapkan.

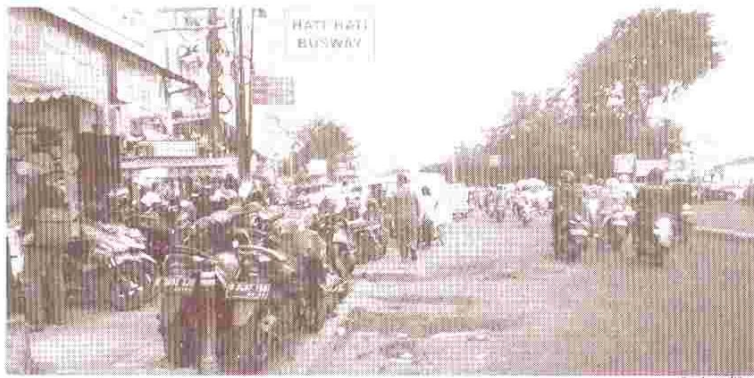
"Pengelolaan parkir di seantero Jakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi untuk mencapai target pendapatan daerah," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Kamis (27/7).

Dikatakan Ismail, Unit Pengelola (UP) Parkir perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah terjadin-

ya kebocoran retribusi maupun data. "Dengan adanya regulasi ini bisa mengurangi celah terutama bagi penyelenggara maupun yang lainnya untuk melakukan kecurangan dalam pencatatan," imbuhnya.

Ismail menuturkan pernyataan ini berlandaskan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 bahwa realisasi pendapatan UP Perparkiran tahun 2022 hanya mencapai Rp51,3 miliar atau 72,88 persen dari target sebesar Rp70,4 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menambahkan,



Parkir liar yang ada di kawasan PGC, Jaktim.

kan, masih banyak lokasi parkir yang belum dikelola secara moderen dan retribusi perparkiran masih dipungut secara manual.

Hasan menyebutkan, sejumlah loka-

si itu berada di Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Boulevard dan Kelapa Gadang. "Ketika kita mampir makan di situ terkesan enggak ada yang kelo-

la parkirnya. Sementara area parkirnya luas," ujar Umar.

Ditambahkan anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak, perlu adanya penerapan pungutan parkir secara ele-

ktronik yang baik dan perlu adanya kesungguhan niat untuk menjalankannya. "Saya kira itu juga perlu memberikan kajian kenapa (mesin elektronik) itu tidak diberdayakan," tutur Gilbert.

Terkait hal itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin menjelaskan, parkir dikelola dengan dua model, yakni dikelola secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Kedua oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dengan skema bagi hasil. "Nah kami akui memang ada yang rusak dan masih perlu kami perbaiki," ungkapnya. (\*/lfn)